



PERAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM PEMENUHAN AIR MINUM DI KOTA CIMAH

Yolla Maharany Irawan¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Fenomena penelitian terdapat pada masih banyak rumah tangga yang kesulitan memperoleh akses air minum layak serta sebagian rumah tangga masih bergantung pada sumur gali, sumur bor, atau harus membeli air isi ulang, yang kualitasnya belum tentu memenuhi syarat kesehatan. Rumusan masalahnya yaitu "Bagaimana Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi dengan menggunakan teori pemerintah menurut Siagian (2009) yang meliputi dimensi stabilisator, modernisator, pelopor, inovator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi stabilisator belum mampu menjamin pemerataan layanan, proses modernisasi dan pengembangan inovasi masih terbatas, peran pelopor dalam perluasan pelayanan belum optimal, serta peran katalisator dalam membangun kerja sama antarpihak belum berjalan efektif. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian mengenai Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Air Minum telah menjalankan fungsinya pada lima dimensi, yaitu Stabilisator, Modernisator, Pelopor, Inovator, dan Katalisator. Peran ini terlihat dari upaya menjaga kontinuitas pelayanan, melakukan pembaruan sistem dan prosedur, mendorong inovasi internal, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antarunit kerja.

Kata Kunci: Pemenuhan Air Minum, Badan Layanan Umum Daerah, Peran Pemerintah Daerah

Abstract

The problematic phenomenon is that many households still struggle to obtain access to safe drinking water. Some households still rely on dug wells, drilled wells, or have to purchase refilled water, the quality of which does not necessarily meet health requirements. The research question is, "What is the Role of Regional Public Service Agencies in Providing Drinking Water in Cimahi City?" This study aims to analyze the role of Regional Public Service Agencies in Providing Drinking Water in Cimahi City using Siagian's (2009) theory of government, which encompasses the dimensions of stabilizer, modernizer,

pioneer, innovator, and catalyst. This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included literature and field studies in the form of observation, interviews, and documentation. The results indicate that the stabilizer function has not been able to ensure equitable service distribution, the modernization and innovation development process is still limited, the role of pioneers in expanding services is not optimal, and the role of catalysts in building cooperation between parties has not been effective. Based on the results of observations and research on the Role of the Regional Public Service Agency in the Fulfillment of Drinking Water in Cimahi City, it can be concluded that the Regional Public Service Agency for Drinking Water has carried out its functions in five dimensions, namely Stabilizer, Modernizer, Pioneer, Innovator, and Catalyst. This role is evident in efforts to maintain service continuity, update systems and procedures, encourage internal innovation, and strengthen coordination and communication between work units.

Keywords: *Drinking Water Fulfillment, Regional Public Service Agency, Local Government Role*

PENDAHULUAN

Kota Cimahi terus mengalami perkembangan, baik dari jumlah penduduk maupun aktivitas masyarakat, sehingga kebutuhan akan air minum yang aman dan berkualitas juga meningkat. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan ini, terutama melalui Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian layanan air minum. Optimalisasi peran Badan Layanan Umum Daerah diperlukan agar pelayanan air minum dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi berperan sebagai pelaksana utama pemenuhan air minum bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan, Badan Layanan Umum Daerah berusaha mewujudkan akses air minum yang merata dan berkualitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan secara berkesinambungan. Keberhasilan pemenuhan air minum sangat bergantung pada efektivitas Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan data Badan Layanan Umum Daerah, jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2025 mencapai 606.286 jiwa dengan 151.572 kepala keluarga, sedangkan luas wilayah hanya 42,43 km², sehingga kepadatan penduduk mencapai sekitar 14.289 orang per km². Cakupan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Cimahi Utara saat ini melayani 33.813 jiwa, mencakup beberapa kelurahan dan fasilitas tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pada sumur gali, sumur bor, atau membeli air isi ulang sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan air minum belum merata dan kualitasnya belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi 2025–2029 dan Rencana Kerja 2025 menunjukkan bahwa capaian cakupan layanan air minum pada 2024 telah mencapai 79,19%, melebihi target tahunan. Namun, pemenuhan air minum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air baku, kapasitas sistem penyediaan, serta lambannya realisasi program SPAM regional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target Badan Layanan Umum Daerah Air Minum dalam Renstra dan capaian aktual, sehingga peran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum sebagai pelaksana operasional belum sepenuhnya optimal (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025).

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga masih mengalami kesulitan memperoleh akses air minum layak. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air alternatif seperti sumur gali, sumur bor, air isi ulang, atau air hujan yang diolah secara sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan air minum layak bagi seluruh masyarakat belum sepenuhnya terlaksana (Hasan & Prijanto, 2023).

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis peran Badan Layanan Umum Daerah dalam pemenuhan air minum di Kota Cimahi. Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Badan Layanan Umum Daerah dalam pemenuhan air minum di Kota Cimahi?”, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Layanan Umum Daerah dalam pemenuhan air minum di Kota Cimahi.

Landasan teori penelitian ini mengacu pada teori Siagian (2009) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dapat dilihat dalam lima dimensi utama. Sebagai stabilisator, pemerintah menjaga kestabilan agar kebijakan pembangunan berjalan lancar. Dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah Air Minum, hal ini diwujudkan dengan menjaga kontinuitas pelayanan air minum, meskipun distribusi layanan masih belum merata. Sebagai modernisator, pemerintah mendorong masyarakat meninggalkan kebiasaan lama menuju sistem yang lebih modern, namun peran ini di Badan Layanan Umum Daerah Air Minum masih terbatas. Sebagai pelopor, pemerintah melakukan pembangunan inovatif; Badan Layanan Umum Daerah Air Minum memperluas jaringan SPAM dan meningkatkan jangkauan layanan, meski belum optimal.

Selain itu, sebagai inovator, pemerintah menciptakan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi layanan; Badan Layanan Umum Daerah Air Minum menerapkan beberapa inovasi, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Sebagai katalisator, pemerintah mempercepat pembangunan melalui kolaborasi antarinstitusi dan masyarakat; Badan Layanan Umum Daerah Air Minum berperan mendorong sinergi dengan pihak swasta dan masyarakat, namun kerja sama tersebut belum maksimal. Dengan demikian, kelima dimensi ini menjadi acuan untuk menganalisis sejauh mana Badan Layanan Umum Daerah Air Minum menjalankan perannya dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis peran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi dalam pemenuhan air minum yang layak dan berkelanjutan. Unit analisis penelitian adalah Badan Layanan Umum Daerah Air Minum, dengan beberapa informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terkait pelayanan air minum.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi nonpartisipatif, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan peran, inovasi, dan kolaborasi Badan Layanan Umum Daerah dalam penyediaan air minum bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Peran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat melalui lima dimensi, yaitu stabilisator, modernisator, pelopor, inovator, dan katalisator. Lima dimensi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum dijalankan dalam pelayanan air minum kepada masyarakat. Setiap dimensi menunjukkan bentuk peran yang berbeda dalam pelaksanaannya. Meskipun berbeda, kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan antar dimensi ini menjadi dasar dalam melihat peran pelayanan air minum secara menyeluruh.

a. Peran sebagai Stabilisator

Peran sebagai stabilisator menggambarkan upaya Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi dalam menjaga kestabilan pelayanan air minum agar berlangsung secara berkelanjutan. Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia setiap saat, sehingga gangguan teknis maupun nonteknis dapat berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dimensi stabilisator menjadi penting untuk menilai efektivitas Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Stabilisasi pelayanan tidak hanya terkait dengan ketersediaan air secara fisik, tetapi juga mencakup pengendalian agar pelayanan tetap terkendali. Kestabilan ini meliputi kontinuitas distribusi, keandalan sistem, serta kemampuan organisasi dalam mengantisipasi dan menangani gangguan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Umum, pengendalian operasional dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja melaksanakan tugasnya sesuai fungsi masing-masing. Pemantauan rutin dan koordinasi antarunit menjadi

strategi utama agar pelayanan tetap lancar. Upaya ini mencakup pemantauan aktivitas unit teknis produksi dan distribusi, sehingga gangguan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Kendala yang muncul di lapangan, seperti kerusakan jaringan atau gangguan teknis instalasi, ditangani melalui koordinasi cepat antarunit. Jika gangguan membutuhkan waktu lama, suplai air melalui mobil tangki digunakan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan. Selain aspek teknis, penanganan pengaduan masyarakat menjadi bagian dari stabilisasi pelayanan, dengan setiap laporan diteruskan ke unit teknis agar segera ditindaklanjuti.

Hasil wawancara dengan masyarakat di beberapa kelurahan menunjukkan bahwa kestabilan layanan air minum bervariasi. Beberapa wilayah seperti Cibereum relatif stabil karena adanya jaringan perpipaan, sementara wilayah lain seperti Padasuka, Cibabat, dan Cipageran masih bergantung pada sumur atau air galon sebagai cadangan, terutama saat musim kemarau. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pengelola telah melakukan berbagai upaya, kestabilan pelayanan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Observasi juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum terjangkau sepenuhnya oleh pelayanan air minum resmi, sehingga kestabilan layanan masih menjadi tantangan.

b. Peran sebagai Modernisator

Peran sebagai modernisator membahas upaya Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi dalam melakukan pembaruan dan penyesuaian pelayanan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan. Modernisasi tidak hanya terkait teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan alur kerja, sistem pelayanan, dan mekanisme koordinasi agar layanan tetap efisien dan mudah diakses.

Pelayanan air minum menuntut kemampuan adaptasi terhadap pertumbuhan penduduk dan perubahan pola permukiman. Kepala Urusan Administrasi Umum menjelaskan bahwa alur kerja ditata

ulang secara bertahap dan teknologi digunakan untuk mendukung operasional, tanpa mengganggu pelayanan masyarakat. Di sisi distribusi, meskipun sebagian besar proses masih manual, rencana modernisasi sedang disiapkan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan koordinasi.

Dalam pelayanan pelanggan, sistem pengaduan berbasis *website* (Digilab) sedang dikembangkan untuk mempermudah akses dan mempercepat respons, meskipun sebagian masyarakat masih mengandalkan metode manual. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi layanan belum sepenuhnya merata, terutama dari sisi digitalisasi, dan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna dan staf.

Dari perspektif masyarakat, modernisasi layanan terlihat bervariasi. Di Cibereum, jaringan perpipaan dan penggunaan meteran memudahkan pengelolaan air, sedangkan di Cibabat, Padasuka, dan Cipageran, masyarakat masih bergantung pada kombinasi air PDAM, sumur, dan air galon. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi sederhana dan sarana fisik dapat membantu efisiensi penggunaan air, meskipun modernisasi berbasis digital belum optimal. Observasi juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan sumber alternatif, sehingga modernisasi pelayanan air minum belum menjadi pilihan utama secara merata.

c. Peran sebagai Pelopor

Peran sebagai pelopor menggambarkan upaya Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi dalam mendorong inovasi internal dan pengembangan pola pelayanan agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelopor menekankan kemampuan organisasi untuk memperkenalkan pembaruan, menciptakan inovasi teknis maupun prosedural, serta membangun pola kerja yang lebih efektif dalam mendukung kontinuitas dan kualitas layanan.

Setiap unit kerja diberikan kesempatan untuk mengajukan gagasan perbaikan, mulai dari prosedur distribusi, pemeliharaan

jaringan, hingga pengelolaan kualitas air. Inovasi dilakukan secara proaktif agar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit. Kepala Urusan Administrasi Umum menjelaskan bahwa pelayanan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pelanggan sehingga respons terhadap keluhan masyarakat dapat meningkat. Pendekatan ini bersifat kolaboratif dan berkesinambungan, memungkinkan masalah ditangani secara cepat dan tepat.

Dari perspektif masyarakat, dukungan terhadap pembaruan layanan terlihat di beberapa kelurahan. Di Kelurahan Cibereum, masyarakat menyambut baik pemasangan jaringan perpipaan yang mempermudah akses air langsung ke rumah. Di Kelurahan Padasuka, Cipageran, dan Cibabat, masyarakat masih mengandalkan sumur atau air galon, sehingga partisipasi mereka lebih fokus pada pengajuan harapan dan keluhan melalui forum RT/RW atau pemanfaatan layanan yang tersedia. Observasi lapangan menunjukkan bahwa peran pelopor telah dilakukan, tetapi implementasi pembaruan fisik seperti jaringan perpipaan hanya menjangkau wilayah tertentu (Cibereum), sementara wilayah lain belum sepenuhnya merasakan inovasi ini.

d. Peran sebagai Inovator

Peran inovator berfokus pada upaya menghadirkan inovasi teknis, operasional, dan prosedural untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keandalan pelayanan. Inovasi mencakup penyempurnaan alur kerja internal, penyesuaian distribusi air, dan pengembangan layanan berbasis digital.

Dalam aspek teknis, proses pengolahan dan distribusi disesuaikan agar lebih efisien dan tertata, tetap memperhatikan kualitas air. Inovasi operasional meliputi penataan alur kerja, penyederhanaan prosedur, dan pemantauan distribusi harian. Masukan masyarakat dijadikan acuan untuk menyesuaikan pola distribusi, serta mempercepat penanganan gangguan seperti kebocoran pipa.

Inovasi pelayanan juga diarahkan pada pemanfaatan media digital, termasuk media sosial dan pengembangan website sebagai sarana informasi dan pengaduan. Website masih dalam tahap penyempurnaan sehingga pemanfaatannya belum optimal. Dari perspektif warga, inovasi dirasakan secara nyata di Cibereum melalui jaringan perpipaan langsung ke rumah, sementara di Padasuka, Cipageran, dan Cibabat, masyarakat masih mengandalkan sumur atau air galon. Variasi produk dan pengelolaan layanan tetap menjadi bentuk inovasi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah lain.

e. Peran sebagai Katalisator

Peran sebagai katalisator dalam penelitian ini menggambarkan kemampuan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi untuk memperkuat komunikasi antarunit kerja, koordinasi kegiatan operasional, serta pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan. Fungsi katalisator menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertugas menyediakan layanan, tetapi juga menjadi penghubung yang memastikan setiap informasi, keluhan, maupun saran masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat, sehingga kontinuitas dan keandalan pelayanan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Umum, komunikasi pelayanan disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat, termasuk dorongan bagi warga untuk lebih peduli terhadap penggunaan air dan menyampaikan masukan. Pengaduan dan masukan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan. Sementara itu, Kepala Urusan Distribusi menegaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui koordinasi langsung dengan masyarakat dan bagian pelayanan agar setiap keluhan dapat segera ditindaklanjuti. Masukan diperoleh melalui berbagai saluran, seperti media sosial, surat edaran, maupun laporan langsung dari petugas lapangan. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar penyesuaian distribusi air dan penanganan gangguan, termasuk kebocoran pipa atau gangguan aliran air, sehingga layanan tetap berjalan lancar.

Di Urusan Pelayanan Langganan, komunikasi dilakukan melalui koordinator wilayah untuk menyalurkan informasi ke pelanggan. Pengumpulan umpan balik dilakukan melalui laporan keluhan dan survei kepuasan masyarakat setiap tahun. Hasil survei digunakan untuk fokus pada indikator dengan nilai terendah dan menjadi dasar penyusunan program edukasi maupun pelatihan bagi petugas pelayanan. Pendekatan ini memperlihatkan upaya sistematis pengelola layanan dalam memastikan komunikasi dua arah tetap berjalan dan kualitas layanan meningkat secara berkelanjutan.

Dari perspektif masyarakat, pengalaman komunikasi bervariasi di tiap kelurahan. Di Kelurahan Cibereum, Padasuka, dan Cibabat, keluhan biasanya disampaikan melalui jalur resmi RT/RW atau pengurus lingkungan sebelum diteruskan ke pihak pengelola, sedangkan di Kelurahan Cipageran, masyarakat kerap menggunakan jalur tidak langsung melalui toko atau warung yang menjual air minum. Meskipun metode ini sederhana, keluhan yang disampaikan tetap ditindaklanjuti dan memudahkan pengelola menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi lapangan. Observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari keberadaan pengelola layanan, sehingga keterlibatan mereka dalam penyampaian keluhan masih terbatas. Kondisi ini memengaruhi efektivitas komunikasi dan keterlibatan warga dalam pengawasan layanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian mengenai Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Air Minum telah menjalankan fungsinya pada lima dimensi, yaitu Stabilisator, Modernisator, Pelopor, Inovator, dan Katalisator. Peran ini terlihat dari upaya menjaga kontinuitas pelayanan, melakukan pembaruan sistem dan prosedur, mendorong inovasi internal, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antarunit kerja. Meskipun berbagai upaya telah memberikan dampak positif,

terutama pada wilayah yang telah terlayani jaringan perpipaan, manfaat pelayanan air minum belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Dengan demikian, Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi berjalan dengan baik, namun belum optimal, sehingga masih diperlukan pemerataan layanan, penguatan inovasi, dan perluasan jangkauan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan air minum yang andal, efektif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aco, L., & Serlina. (2020). PENGARUH KUALITAS AIR MINUM TERHADAP PEMBELIAN ULANG KONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM FIKRI KABUPATEN TOLITOLI. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Ardhi, J., Kudubun, E. E., & Utomo, A. W. (2024). Peran Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Menjaga Kelestarian Wisata Kalitaman dalam Pembangunan Keberlanjutan di Salatiga. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*.
- Aridhayandi, M. R. (2024). PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERSEDIAAN AIR MINUM UNTUK KONSUMEN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. *Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3*.
- Hasan, N. Y., & Prijanto, T. B. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN AIR HUJAN SEBAGAI SUMBER AIR BERSIH "URBAN FARMING" DI WILAYAH CIBABAT CIMAHI. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT KESEHATAN INDONESIA*.
- Nabillah, T., & Pawestri, A. Y. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Air pada Masyarakat (Ditinjau dari Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang SDA). *Indonesian Journal Law and Justice Volume 2, Number 3, 1-8*.
- Pangestu, M. P., & Lusno, M. D. (2025). Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan Parameter Fisik dan Mikrobiologi: Studi

Cross-Sectional Mengacu pada Standar Nasional. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 1689-1696.

Pramana, P. E., Pangemanan, S., & Egeten, M. (2017). KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN KOTA BITUNG. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.

Rusnaini, S., Zulkifli, Darmawanto, Poiran, Elsyra, N., & Hamirul. (2022). Peran Dinas Kesehatan Dalam Koordinasi Dan Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi Vol.2 No.1*, 110-119.

Buku

Aresnawati. (2016). *Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Pelaksanaan di Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Haudi. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok Sumatera Barat : INSAN CENDEKIA MANDIRI.

Sembiring, T. B., Bakri, A. A., Andrias, M. Y., & Fatriani, R. M. (2023). *SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH*. Solok: MAFY media literasi INDONESIA.

Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). *HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH*. Malang: Setara Press.

Dokumen

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025). *RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN 2025)*. Cimahi: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025). *RENSTRA 2025-2029*. Cimahi: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Akhir Penelitian 2020 Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.